

TATA KELOLA PENGENDALIAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

Ripdah Alifa
NPP. 31.0409

Asdaf Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email : alifaripdah@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Alma 'Arif, S.IP., MA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The number of neglected children in Tangerang Regency is the highest in Banten province, so a government commitment is needed to control the high number of homeless in Tangerang Regency. The high number of abandoned children in Tangerang Regency is directly proportional to the population density in Tangerang Regency.*

Purpose: *This study aims to identify and describe the factors that cause the governance of neglected children control in Tangerang Regency to not be optimal and analyze the right steps in controlling neglected children in Tangerang Regency, Banten Province.*

Method: *This research uses a constructivism paradigm relying on qualitative data with an inductive approach..*

Result: *The results of the study describe that the governance of controlling abandoned children in Tangerang Regency is still not running optimally, this is because there are still supporting factors for controlling abandoned children that have not been fulfilled. One of the factors causing the non-optimal governance of controlling abandoned children in Tangeang District is the limited resources both from Human Resources, facilities and infrastructure and the quality of the implementing organization.*

Conclusion: *The governance of controlling neglected children in Tangerang Regency is still not running optimally. In the final part of this thesis, the researcher puts forward several suggestions to be input from researchers related to the implementation of governance in controlling neglected children in Tangerang Regency.*

Keywords: *Governance; Control; Neglected Children*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Jumlah anak terlantar di Kabupaten Tangerang merupakan jumlah tertinggi di Provinsi Banten, sehingga diperlukannya peran pemerintah untuk mengendalikan jumlah anak terlantar di Kabupaten Tangerang. Tingginya jumlah anak terlantar di Kabupaten Tangerang berbanding lurus dengan kepadatan jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan terkait faktor faktor yang menyebabkan tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang belum optimal serta menganalisis langkah yang tepat dalam pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten **Metode:** Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme mengandalkan data kualitatif dengan pendekatan induktif. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang masih belum berjalan secara optimal hal ini disebabkan masih terdapat faktor-faktor penunjang pengendalian anak terlantar masih belum terpenuhi. Salah satu faktor penyebab belum optimalnya tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang yaitu keterbatasan sumber daya baik dari Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana dan kualitas dari organisasi pelaksana. **Kesimpulan:** Tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang masih belum berjalan secara optimal. Pada bagian akhir skripsi ini peneliti mengemukakan beberapa saran untuk menjadi masukan dari peneliti terkait pelaksanaan tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang.

Kata kunci: Tata Kelola; Pengendalian; Anak Terlantar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan setiap manusia berhak mendapatkan kesejahteraan sosial tersebut, tidak terkecuali anak terlantar sebagaimana diamanatkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Undang-Undang 1945 Pasal 34 ayat 1. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwasanya pemerintah perlu melakukan perlindungan terhadap anak terlantar. Menurut (Andayani Listyawati, 2008) menyatakan bahwa “anak terlantar merupakan sebagaimana anak pada umumnya, mereka memerlukan kebutuhan dasar sebagai haknya”. Kebutuhan dasar tersebut berupa terpenuhinya kebutuhannya baik berupa jasmani, rohani maupun sosial.

Anak terlantar termasuk kedalam salah satu jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Indonesia, keadaan jumlah PMKS di Provinsi Banten setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah PMKS terkhususnya anak terlantar di Provinsi Banten dikarenakan belum meratanya pembangunan baik dalam sarana dan prasarana maupun sosialnya. Berdasarkan data dari buku pemutakhiran data PMKS dan PSKS Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2022 jumlah anak terlantar di Provinsi Banten berjumlah 141.072 jiwa dan merupakan jumlah tertinggi kedua setelah angka kemiskinan, sama halnya dengan kondisi anak terlantar di

Kabupaten Tangerang dimana jumlah anak terlantar tertinggi di Provinsi Banten berada di Kabupaten Tangerang dengan jumlah 69.536 jiwa (Dinas Sosial Prov. Banten, 2022).

Tingginya jumlah anak terlantar di Kabupaten Tangerang berbanding lurus dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang. Pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 tahun 2007 tentang Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, peraturan tersebut juga dibuat sebagai betuk perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk kepada anak terlantar yang ada di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 tahun 2007 dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang mempunyai peran penting dalam memenuhi perlindungan sosial berupa pemenuhan hak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial terkhusus pada anak-anak terlantar, namun kenyataannya jumlah anak terlantar masih terus bertambah dalam rentang waktu empat tahun belakangan hal ini bertolak belakang dengan tujuan dibuatnya peraturan daerah tersebut. Tata kelola pemerintah yang proaktif diperlukan untuk menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan termasuk anak terlantar (Suranto dan Darumurti, 2024)

Konsep *governance* diperlukan dalam pengendalian anak terlantar untuk merepresentasikan perubahan peran pemerintah yang mulai melibatkan aktor lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Izana, N. N., Susanti, A., & Afala, 2022). Dengan adanya *governance* akan berdampak pada perubahan relasi negara dan masyarakat serta kehadiran pihak ketiga dalam pelayanan public (Pierre, J., & Peters, 2021). Selain itu *governance* juga merujuk sebagai sebuah kapasitas negara dalam menentukan sebuah kebijakan (Matthews, 2012). Tata kelola anak terlantar merupakan upaya penanganan maupun pengendalian anak terlantar yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara maupun program untuk mengurangi tingginya jumlah anak terlantar. Semua tatanan pemerintah dan sektor masyarakat sipil memiliki andil dalam menghasilkan perlindungan sosial bagi anak terlantar. *governance network* berfokus pada proses interaksi yang kompleks dalam jaringan aktor publik, swasta, dan masyarakat termasuk individu, kelompok, organisasi dan kelompok organisasi (Kooiman, 1993). *Governance* sebagai teori baru dalam tata kelola pemerintahan melibatkan tiga aktor yang saling berinteraksi *state*, *private sector* dan *society* (Setyowati, 2019). Kepentingan mendorong pihak- pihak melakukan interaksi dengan mitranya di dalam melakukan suatu tindakan yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Pengaruh atau kekuatan merupakan modal di dalam interaksi dengan pihak lain yang diharapkan dapat menggalang kerja sama yang seimbang. Pengaruh dan kepentingan tersebut menentukan posisi aktor-aktor sebagai subjek, pemain kunci, pendukung, atau pengikut (Fifiyanti, D. & Damanik, 2021).

Penelitian ini didasari dengan konsep teori *homelessness governance*, *governance* dan juga *governance network*. Konsep teori tersebut digunakan untuk menjawab faktor faktor mengenai tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang masih belum optimal serta bagaimana tata kelola pengendalian anak terlantar yang ideal dan mampu mewujudkan tata kelola pengendalian anak terlantar yang optimal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kondisi anak terlantar di Kabupaten Tangerang salah satunya adalah tingginya jumlah anak terlantar di Kabupaten Tangerang yang masih menjadi permasalahan dalam tata kelola pengendalian anak terlantar. Hal ini sejalan dengan data dari Dinas Sosial Provinsi Banten yang tercantum dalam Buku Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Provinsi Banten tahun 2022 dimana jumlah anak terlantar di Provinsi Banten adalah 141.072 jiwa dan merupakan jumlah tertinggi kedua setelah angka kemiskinan, sama halnya dengan kondisi anak terlantar di Kabupaten Tangerang dimana jumlah anak terlantar tertinggi di Provinsi Banten berada di Kabupaten Tangerang dengan jumlah 69.536 jiwa (Dinas Sosial Prov. Banten, 2022). Data ini menunjukkan bahwa anak terlantar harus menjadi salah satu prioritas dalam penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial, hal itu dikarenakan anak menjadi generasi penerus pembangunan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga diperlukan tata kelola pengendalian anak terlantar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Untuk sumber penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh peneliti yaitu penelitian karya (Phelan, E., & Norris, 2008) dengan judul penelitiannya “Neo-coporatist governance of homeless service in Dublin: Reconceptualization, incorporation and exclusion” Dalam penelitian ini Phelan bukan saja menjelaskan mengenai tata kelola “governance” namun dikhususkan juga membahas homelessness yang didalamnya mengkaji tentang neo-korporatis dalam tata kelola layanan tunawisma di Dublin. Menurut Bosch Meda (dalam Phelan, E., & Norris, 2008) hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memecahkan tunawisma yaitu dengan urban planning. Penelitian yang sama juga mengenai homelessness diteliti oleh (O’Sullivan, 2012) dengan judul “Policies to Address Homelessness: Partnership-Based Approaches in Ireland”. Penelitian karya O’Sullivan ini merupakan sebuah artikel yang mengulas bagaimana cara menyelesaikan homelessness di Irlandia dengan pendekatan “partnership-based approaches” atau dalam kata lain pendekatan berbasis kemitraan atau kerjasama. Selain itu, Imam Sukadi dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak” pada tahun 2013 menjelaskan bahwa kurangnya terealisasinya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep good governance dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar (Sukadi, 2013). Selanjutnya penelitian mengenai homelessness dikembangkan lagi oleh (Dwyer, P., Bowpitt, G., Sundin, E., & Weinstein, 2015) dengan judul penelitian “Rights, responsibilities and refusals: Homelessness policy and the exclusion of single homeless people with complex needs”. Dawyer mengemukakan bahwa terdapat dua faktor signifikan dalam memahami mengapa banyak individu yang rentan dengan banyak kebutuhan tetap menjadi tunawisma. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Darmini dan Laurensius pada tahun 2018 dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia” menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat vital didalam perlindungan anak. Hal ini tertuang didalam pasal-pasal

Undang-Undang Perlindungan Anak. Didalam mewujudkan tata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah haruslah benar-benar direalisasikan dan dijalankan dengan semestinya. Pemerintah Daerah sebagai pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan anak, harusnya lebih aktif dan lebih kritis, untuk menyuarakan hak-hak anak. Menata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah harus diawasi sebuah lembaga sendiri yang fokus untuk melindungi, menjaga, memantau dan mengawasi hak anak (Roza, Darmini., & Arliman, 2018). Kemudian, Kourachanis pada tahun 2019 dengan penelitian yang berjudul “*Homelessness Policies in the Liberal and the Southern European Welfare Regimes: Ireland, Portugal, and Greece*” Penelitian ini menjelaskan bahwa *homelessness* adalah bentuk pengucilan sosial yang multidimensi, dan kemunculannya dapat dijelaskan melalui empat kategori umum penyebab: struktural, institusional, hubungan, dan individu (Kourachanis, 2019).

Kemudian penelitian dari Erin Dej, dkk pada tahun 2020 dengan judul “*Turning Off the Tap: A Typology for Homelessness Prevention*” menjelaskan bahwa pencegahan *homelessness* dapat dilakukan tipologi pencegahan tunawisma (THP). Dari definisi tersebut Erin Dej menawarkan sebuah skema untuk memperjelas sifat dari pencegahan tunawisma dan untuk mengembangkan respon kolektif antara berbagai kebijakan dan praktik yang dapat dan harus dibingkai sebagai pencegahan tunawisma (Dej, Erin. Gaetz, Stephen & Schwan, 2020). Wahyudi dalam penelitian yang berjudul “Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar” menjelaskan bahwa bagaimana peran Dinas Sosial dalam membina anak jalanan di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah kota dalam menangani anak jalanan di Kota Makassar yang menunjukkan bahwa aspek pencegahan dilakukan dengan kegiatan patroli setiap hari secara rutin oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang, aspek pembinaan lanjutan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk mengetahui alasan anak turun ke jalan dengan cara melakukan identifikasi atau assesment di RSPA (Rumah Perlindungan Sosial Anak), dan aspek rehabilitasi yaitu rehabilitasi anak jalanan dengan cara kerjasama antara Dinas Sosial Kota Makassar dengan Yayasan Kelompok Penyalahgunaan Penyalahguna Narkotika (YKP2N) (Wahyudi, 2021).

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang menjadi referensi pada penelitian ini yaitu artikel karya Alison Smith pada tahun 2022 dengan judul “*Multiple Barriers: The Multilevel Governance of Homelessness in Canada*” (Smith, 2022). Dalam artikel ini, Smith menjelaskan tuna wisma yang kronis dan berjangka panjang merupakan masalah baru dalam kebijakan publik di Kanada. Smith mengedepankan *multi-level governance* dalam penanganan *homelessness* di Kanada. Kemudian Ellya Susilowati pada tahun 2022 melakukan penelitian mengenai anak terlantar dengan judul “Praktik Perlindungan Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak” yang menjelaskan bahwa Praktik Perlindungan Anak bagi anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) masih terbatas dan belum banyak dilakukan sehingga kasus-kasus kekerasan pada anak terlantar di LKSA masih terus terjadi. Artikel tersebut bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang praktik perlindungan anak terlantar di LKSA (Susilowati, 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang menggunakan paradigma konstruktivisme yang dimana belum adanya teori yang mampu menjelaskan terkait masalah tata kelola pengendalian anak terlantar sehingga dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan sebanyak mungkin pandangan partisipan yang terkait masalah tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang. Penggunaan paradigma konstruktivisme mengandalkan data kualitatif dengan pendekatan induktif dimana proses induktif yang membangun dari data ke tema-tema yang luas ke sebuah umum ke model atau teori yang digeneralisasi (Punch, 2005 dalam (Creswell, 2023) serta dengan menggunakan analisis tematik dengan bantuan metode *coding* berbeda dengan penelitian dari Phelan, Dawyer, Wahyudi dkk.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan tata kelola anak terlantar di Kabupaten Tangerang belum optimal; dan untuk menganalisis dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma konstruktivisme untuk mengingat realitas tata kelola pengendalian anak terlantar yang kompleks dan dinamis sehingga penelitian ini lebih memilih memahami perspektif subjektivitas peneliti dan informan. Paradigma konstruktivisme mencakup pemahaman, makna partisipan yang beragam, konstruksi sosial dan sejarah, serta pembuatan teori (Creswell, 2023). Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2016) dengan menggunakan triangulasi data untuk penentuan keabsahan data. Kemudian untuk teknik analisis data peneliti menggunakan analisis tematik, dimana analisis tematik dikatakan sangat cocok untuk semua penelitian kualitatif yang mengandalkan proses pengkodean (*coding*) dan data set untuk menghasilkan sebuah tema dengan bantuan aplikasi Nvivo 12 *plus*. . Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua macam. Menurut (Simangunsong, 2016) data berdasarkan sumbernya meliputi data primer dan data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor yang Memengaruhi Belum Optimalnya Tata Kelola Pengendalian Anak Terlantar di Kabupaten Tangerang

3.1.1 Minimnya Sumber Daya Manusia

Menurut (Kasmir, 2016) sumber daya manusia merupakan motor penggerak seluruh aktivitas perusahaan. Demikian pula dengan kualitas SDM haruslah memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan yang telah dipersyaratkan. Dalam organisasi pemerintahan, sumber daya manusia sangat diperlukan untuk membantu proses pelayanan. Dinas Sosial Kabupaten Tangerang memiliki tanggung jawab khusus agar tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang lebih optimal namun kurangnya SDM menjadi faktor penghambat dalam pengoptimalan tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang. Dinas Sosial Kabupaten Tangerang saat ini masih membutuhkan penambahan pegawai yang berkualitas dan berkompeten untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

3.1.2 Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Tangerang memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang terdapat baik di Sekretariat Dinas Sosial maupun di UPT. Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Tangerang masih belum mencukupi untuk mengoptimalkan maupun mempercepat proses pelayanan terhadap anak terlantar. Selain di Kantor Sekretaria Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, kekurangan sarana dan prasarana juga terjadi di UPT Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Berikut data kebutuhan sarana dan prasarana baik di Pelayanan Kesejahteraan Anak di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial maupun di UPT Rehabilitasi Sosial.

Tabel 1. Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Kurang di Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

No.	Jenis Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	4
2	Kendaraan Roda 2	5
3	Komputer	3
4	Laptop	3
5	Printer	2
6	Televisi	5
7	Poliklinik	1

8	Tempat Rekreasi Anak	1
9.	Ruang Konseling	1
Jumlah Total		26

Sumber: (Tangerang, 2023)

3.1.3 Minimnya Jumlah LKSA yang Sudah Terakreditasi Oleh Kemensos

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan salah satu ujung tombak dalam keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal ini khususnya anak. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menjamin tingkat kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah dengan terakritisasinya lembaga di bidang kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah tertuang dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi lembaga di bidang sosial. Berdasarkan data, LKSA di Kabupaten Tangerang yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Sosial RI berjumlah 35 LKSA dalam periode 2018- 2023, namun untuk tahun 2023 hanya 10 LKSA yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Sosial.

Tabel 2. LKSA di Kabupaten Tangerang yang Sudah Terakreditasi oleh Kemensos 2023

No.	Nama LKSA	Tahun Akreditasi
1.	Nurhasanah Selaras	19 September 2023
2.	Amanah Sodikiyah	19 September 2023
3.	Balaraja Peduli Indonesia Raya	19 September 2023
4.	Sirojul Athfal	19 September 2023
5.	Islamic Village	19 September 2023
6.	Nurunnisa	19 September 2023
7.	Pundi Amal Insan Sejahtera	19 September 2023
8.	Hikmah Saadah	19 September 2023
9.	Hikma Saadah	19 September 2023
10.	Asih Lestari	19 September 2023

Sumber: (Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 2023)

Berdasarkan data diatas LKSA di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 belum semuanya teakreditasi bahkan belum mencapai lima puluh persen dari total LKSA yang ada, hal tersebut yang dapat membuat anak terlantar kurang optimal dalam mendapatkan pelayanannya sehingga tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang masih belum optimal. Masih banyaknya LKSA yang belum terakreditasi di Kabupaten Tangerang ditentukan oleh kualitas organisasi pelaksana.

3.1.4 Kepekaan Masyarakat terhadap Keadaan Anak Terlantar

Tingginya jumlah anak terlantar di Kabupaten Tangerang mengharuskan pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mengoptimalkan pelayanan kesejahteraan bagi anak terlantar. Tercapainya program pengendalian anak terlantar dapat dilihat dari indikator jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan baik di panti rehabsos maupun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Jumlah anak terlantar yang telah menerima pelayanan baik dari LKSA maupun Panti Rehabsos masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan total keseluruhan anak terlantar yang terdapat di Kabupaten Tangerang yang berjumlah 69536 anak. Minimnya jumlah LKSA di Kabupaten Tangerang berbanding lurus dengan masih banyaknya anak terlantar yang belum terdeteksi di luar LKSA, sehingga Dinas Sosial perlu bantuan dari berbagai pihak untuk melakukan proses kolaborasi terutama dengan masyarakat, karena masyarakat hidup berdampingan secara langsung dengan anak terlantar.

3.1.5 Belum Adanya Kolaborasi dengan Lembaga Non-Pemerintah

Tata kelola pengendalian anak terlantar bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah semata melainkan perlu adanya kerja sama antar aktor baik swasta maupun masyarakat. Sejalan dengan konsep Kooiman (1993), Kickert (1993) dalam (Tiihonen, 2004) mengatakan bahwa "governance is not only an internal function of the public sector, but interaction between public and private institutions and authorities." Tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang seharusnya tidak ada aktor tunggal dalam hal ini pemerintah daerah yang mendominasi saja, melainkan seluruh aktor perlu adanya keterlibatan agar pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang dapat diatasi dan berjalan secara optimal.

3.2. Tata Kelola Pengendalian Anak Terlantar yang Seharusnya Dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

3.2.1 Penambahan Jumlah Pegawai

Terdapat kendala yang berkaitan dengan ketersediaannya sumber daya dalam tata kelola pengendalian anak terlantar salah satu diantaranya yaitu kurangnya pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yaitu dengan mengajukan permohonan penambahan jumlah pegawai sesuai kualifikasi dan yang kompeten di bidang yang dibutuhkan.

3.2.2 Penambahan Sarana dan Prasarana

Terdapat kendala yang berkaitan dengan ketersediaannya sumber daya dalam tata kelola pengendalian anak terlantar salah satu diantaranya yaitu terbatasnya sarana dan prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yaitu dengan mengajukan permohonan penambahan jumlah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ditambahkan yaitu kendaraan operasional, fasilitas tempat tinggal anak dan fasilitas lainnya untuk menunjang kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar.

3.2.3 Penambahan Jumlah LKSA

Tujuan utama dalam tata kelola pengendalian anak terlantar adalah dengan terpenuhinya kebutuhan dasar anak dan juga mengurangi jumlah anak terlantar di Kabupaten Tangerang. Salah satu upaya dari pemenuhan dasar anak terlantar adalah dengan ditingkatkan jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Dinas Sosial Kabupaten Tangerang telah melakukan kerja sama dengan LKSA yang dikelola oleh masyarakat, namun yang menjadi hambatan yaitu masih kurangnya jumlah LKSA di Kabupaten Tangerang jika dibandingkan dengan jumlah total anak terlantar di Kabupaten Tangerang.

3.2.4 Melakukan Penjaringan terhadap PMKS Setiap Satu Bulan Sekali

Banyaknya jumlah PMKS di Kabupaten Tangerang yang salah satunya adalah anak terlantar mengharuskan Dinas Sosial mempunyai langkah yang tepat untuk mengendalikan banyaknya jumlah anak terlantar. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yaitu dengan rutin melaksanakan penjaringan atau penjangkauan PMKS salah satunya anak terlantar. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap satu bulan sekali, dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan akan semakin banyak anak terlantar yang terdata dan mendapatkan pelayanan.

3.2.5 Memberdayakan LKSA

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan tempat tinggal sekaligus tempat menuntut ilmu bagi anak terlantar, namun masih terdapat hambatan yaitu kurangnya LKSA di Kabupaten Tangerang. Menghadapi hambatan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Tangerang melakukan kerja sama dengan Yayasan panti asuhan sekaligus pondok pesantren secara bersama membentuk LKSA agar jumlah anak terlantar yang menerima pelayanan kebutuhan dasar meningkat dan bertambah.

3.2.6 Sosialisasi Kepada Masyarakat Pentingnya Kepedulian Terhadap Anak Terlantar

Keberadaan anak terlantar di suatu lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat. Pemberian pelayanan terhadap anak terlantar harus didukung dengan adanya kepedulian masyarakat terhadap anak terlantar. Hambatan yang terjadi adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak terlantar, dengan adanya hambatan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Tangerang melakukan upaya berupa sosialisasi akan pentingnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap anak terlantar. sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa ajakan untuk segera melapor jika di lingkungan sekitar masyarakat ditemukan adanya anak terlantar, dan sosialisasi tersebut biasanya dilakukan secara langsung ketika Dinas Sosial sedang melakukan penjaringan ataupun melalui media sosial.

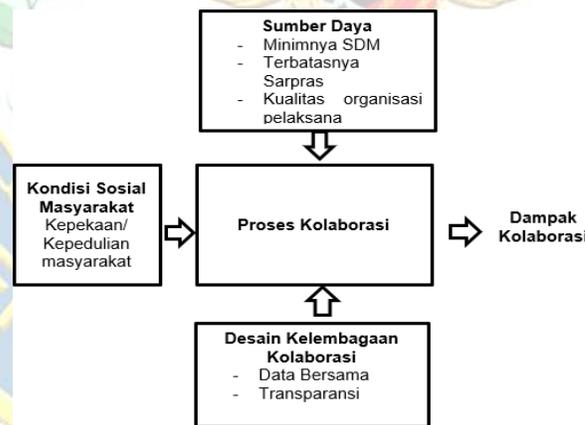
3.2.7 Kerja Sama dengan Berbagai Dinas Terkait Pengendalian Anak Terlantar

Kooiman (1993) dalam (Tiihonen, 2004) mengembangkan konsepsi *governance* yang mendasarkan pada “*networks*”, yang menekankan pada aspek “*interaction*”. Tata kelola

pengendalian anak terlantar perlu peran aktif dari berbagai pihak bukan hanya Dinas Sosial semata melainkan sinergitas antara dinas satu dengan dinas lainnya. Upaya dalam menghadapi kendala dalam tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang, Dinas Sosial Kabupaten Tangerang melakukan kerja sama dengan Disdukcapil untuk membantu menelusuri identitas dari anak terlantar, kemudian bekerja sama dengan Satpol PP dalam melaksanakan penjangkangan PMKS setiap bulan, lalu melaksanakan kerja sama dengan Dinas Sosial kabupaten/kota lain.

Selain kerja sama dengan lembaga pemerintah, kolaborasi dengan lembaga non pemerintah juga bisa dilakukan sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam memandang masalah anak-anak terlantar yang merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan kolaborasi lebih lanjut dengan lembaga non pemerintahan dengan melakukan pengolahan data bersama. Pengembangan data bersama ini menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan dalam memberikan *upgrading* data anak terlantar sehingga dapat diketahui bagaimana perkembangan aktual dari pengendalian yang dilakukan terhadap anak terlantar tersebut.

Dalam menjamin suksesnya proses kolaborasi yang akan dilakukan maka diperlukan unsur transparansi dalam proses pengimpelentasiannya. Dalam hal ini transparansi yang dimaksud adalah bagaimana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan dapat selalu ditinjau dan dievaluasi kekurangannya serta dibuat laporan progress berkala untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pengendalian anak terlantar yang baik. Berikut skema yang akan menggambarkan proses kolaborasi yang potensial untuk dilaksanakan dalam mewujudkan tata kelola pengendalian anak



Gambar 3.1 Skema Proses Kolaborasi Tata Kelola Pengendalian Anak Terlantar

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan berfokus pada tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yang dimana dari hasil penelitian ini dijelaskan masih terdapat kurangnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk menampung anak terlantar yang nantinya akan dipenuhinya kebutuhan dasar dari anak tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ellya

Susilowati pada tahun 2022, dalam penelitian tersebut diejelaskan juga bahwa perlindungan anak bagi anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) masih terbatas. Selain itu dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan penelitian yang dilakukan oleh Smith pada tahun 2022, dalam penelitian yang dilakukan Smith mengedepankan konsep *multi-level governance* dalam penanganan *homelessness* di Kanada dimana konsep *multi-level governance* ini mengarah pada tata kelola bersama yang kolaboratif antara pemerintah dengan aktor-aktor sektor ketiga, sedangkan dalam penelitian ini belum ada dilakukannya proses kolaborasi dengan aktor non pemerintah sehingga tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang masih sebatas dilakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah saja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan mengenai tata kelola pengendalian anak terlantar dapat disimpulkan berikut:

1. Tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang sudah terlaksana namun belum optimal. Belum optimalnya tata kelola pengendalian anak terlantar di Kabupaten Tangerang disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya a) keterbatasan sumber daya meliputi sdm, sarpras, dan kualitas organisasi pelaksana seperti minimnya LKSA yang belum terakreditasi. b) kondisi sosial masyarakat yaitu kepedulian masyarakat dengan keberadaan anak terlantar. c) belum adanya kolaborasi dengan lembaga non pemerintahan.
2. Tata kelola pengendalian anak terlantar yang ideal di Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari keterlibatan antara Pemda dengan aktor non-pemerintah yang dapat dijalin, pemenuhan kebutuhan sumber daya, dan pengondisian kelembagaan kolaborasi melalui data bersama (*sharing-data*) dan adanya proses transparansi

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam melakukan proses penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian belum mendapatkan kepuasan pada penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan tata kelola pengendalian anak terlantar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih untuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peniliti untuk melakukan penelitian, Dosen Pembimbing yang telah membantu peneliti dan membimbing peneliti dari awal hingga akhir proses penelitian ini. Terimakasih untuk semua informan dan semua yang terlibat dalam

membantu penelitian ini sehingga selesai dengan baik

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andayani Listyawati. (2008). *Penanganan anak terlantar: melalui panti asuhan milik perorangan*.
- Creswell, J. W. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.)* (Sixth). SAGE Publications, Inc.
- Dej, Erin. Gaetz, Stephen & Schwan, K. (2020). Turning Off the Tap: A Typology for Homelessness Prevention. *The Journal of Primary Prevention*, 41. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10935-020-00607-y>
- Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. (2023). *LKSA Terakreditasi*.
- Dinas Sosial Provinsi Banten. (2022). *Buku Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Dinas Sosial Provinsi Banten*.
- Dwyer, P., Bowpitt, G., Sundin, E., & Weinstein, M. (2015). *Rights, responsibilities and refusals: Homelessness policy and the exclusion of single homeless people with complex needs. Critical Social Policy*,. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0261018314546311>
- Fifiyanti, D. & Damanik, J. (2021). Pemetaan Peran dan Kontribusi Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Ekowisata Desa Burai. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.36893>
- Izana, N. N., Susanti, A., & Afala, L. O. M. (2022). Tata Kelola Lokal Dan Covid-19: Perlindungan Kesehatan Dan Ekonomi Di Desa Pujon Kidul. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.45436>
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Rajagrafindo Persada.
- Kooiman, J. (1993). *Modern Governance: New Government-Society Interactions*. SAGE Publications, Inc.
- Kourachanis, N. (2019). *Homelessness Policies in the Liberal and the Southern European Welfare Regimes: Ireland, Portugal, and Greece*. HOUSING POLICY DEBATE.
- Matthews, F. (2012). *Governance and State Capacity*. In D. Levi Faur (Ed.). Oxford University Press.
- O'Sullivan, E. (2012). *Policies to Address Homelessness: Partnership-Based Approaches in Ireland*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-047163-1.00382-9>
- Phelan, E., & Norris, M. (2008). *Neo-coporatist governance of homeless service in Dublin*:

Reconceptualization, incorporation and exclusion.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0261018307085507>

- Pierre, J., & Peters, B. G. (2021). *Advanced Introduction to Governance*. UK Edward Elgar Publishing.
- Roza, Darmini. Arliman, L. (2018). *Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia*. 47. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Setyowati, E. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (Idm): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9. <https://doi.org/https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.15575/jispo.v9i2.5324?domain=https://journal.uinsgd.ac.id>
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Smith, A. (2022). *Multiple Barriers: The Multilevel Governance of Homelessness in Canada*. <https://www.jstor.org/stable/10.3138/j.ctv2sm3bcz>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>
- Suranto dan Darumurti, A. (2024). Local Wisdom-Based Policy Innovation in Indonesia During 2018-2021. *Journal of Governance and Public Policy*, 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i1.16920>
- Susilowati, E. (2022). *Praktik Perlindungan Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*. 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/inf.v8i1.2981>
- Tangerang, D. S. K. (2023). *Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tangerang*.
- Tiihonen, S. (2004). *From governing to governance : a process of change*.
- Wahyudi, A. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2.